

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada lingkungan ekonomi seperti saat ini, masyarakat harus mampu bersaing. Pada tahun 2016, pemerintah resmi mengimplementasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang bertujuan mengubah kawasan Asia Tenggara menjadi pasar dan pusat produksi yang lebih dinamis serta kompetitif (Martono & Febriyanti, 2023). MEA memberikan peluang terbuka bagi arus barang, jasa, investasi, dan pekerja yang lebih bebas dan kompetitif. Untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia dalam menghadapi perkembangan tersebut, diperlukan kontribusi dari berbagai sumber termasuk sektor publik dan swasta serta lembaga lainnya. Pengembangan ekonomi yang berbasis masyarakat melalui pendampingan sektor UMKM merupakan salah satu langkah yang diharapkan dapat memberikan dampak positif (Gunawan & Safira, 2022). Menurut Peraturan Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM mencakup bisnis komersial yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerahkan keikutsertaan yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Selain itu, UMKM juga berperan dalam sistem distribusi, peningkatan pendapatan, dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pemeliharaan keseimbangan nasional.

UMKM memberikan peran serta yang berarti, yaitu lebih dari 61% terhadap PDB. Selain itu, sektor ini juga menyediakan lebih dari 97% peluang pekerjaan bagi angkatan kerja, sehingga menjadikannya elemen yang krusial dalam sistem keuangan negara. Dalam konteks industri agribisnis pangan, sektor perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan restoran, UMKM menunjukkan pertumbuhan yang pesat dengan memanfaatkan sumber daya alam dan menerapkan proses yang padat karya. Di sisi lain, usaha menengah mengalami perkembangan yang signifikan dalam penambahan nilai di sektor jasa korporasi, kehutanan, real estate, perhotelan, dan keuangan. Namun, perusahaan besar cenderung memiliki

keunggulan dalam industri pertambangan, manufaktur, minyak, gas, dan komunikasi.. Karena peran penting ini, salah satu fokus utama dalam kebijakan ekonomi pemerintah adalah perluasan dan pengembangan UMKM (Sofyan, 2017).

Data UMKM 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65.46	65	66
Pertumbuhan (%)		1.98%	-2.24%	2.28%	-0,70%	1,52%

*Diolah dari berbagai sumber

Gambar 1. 1 Data UMKM Indonesia Tahun 2018-2023

Sumber : KADIN Indonesia

Berdasarkan data KADIN Indonesia, UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 1,98% tahun 2018 sampai 2019. Namun, pada tahun 2020, laju pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi sebesar 2,24% akibat pandemi COVID-19, yang memiliki dampak global yang besar, termasuk terhadap perekonomian Indonesia, yang juga terdampak oleh krisis tersebut. Sektor UMKM berusaha bergerak kembali dengan menyesuaikan tantangan terbukti dengan kembali naiknya pertumbuhan ditahun 2021 yang naik hingga 2.28% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian ditahun 2022, pertumbuhan kembali mengalami penurunan hingga -0,70% namun kembali naik 1,52% pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan bagaimana para pelaku usaha menanggapi tantangan tersebut. Jumlah kenaikan banyaknya UMKM, serta naik turunnya pertumbuhan UMKM juga terjadi di DKI Jakarta yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia.

Intelligentia - Dignitas

Tabel 1. 1 Data UMKM di DKI Jakarta 2019-2023

Kota Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Jakarta Pusat	6.322	6.025	7.657	6.160	9.280
Jakarta Utara	11.078	9.761	10.036	9.143	16.982
Jakarta Barat	16.969	15.929	17.037	15.297	19.730
Jakarta Selatan	13.780	13.298	11.104	10.174	15.499
Jakarta Timur	14.187	13.524	15.795	14.040	17.325
Kepulauan Seribu	593	480	479	349	1.176
Total	62.929	59.017	62.108	55.163	79.992

Sumber: BPS (2023)

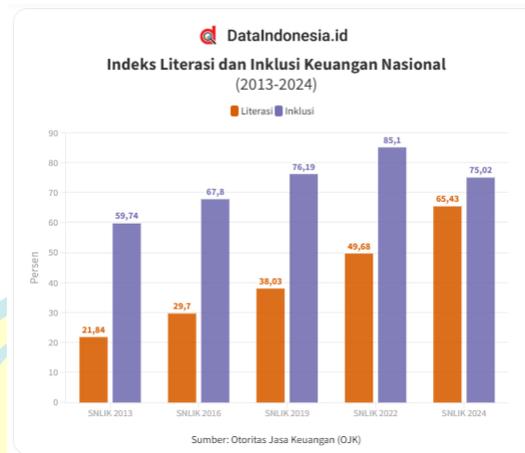
Berdasarkan data diatas, UMKM di DKI Jakarta selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, musibah pandemic memberikan dampak yang sangat terlihat, dengan jumlah UMKM menurun dari 62.929 menjadi 59.017. Penurunan ini terjadi karena banyak usaha yang harus tutup sementara atau bahkan bangkrut akibat pembatasan sosial serta penurunan permintaan pasar. Pada tahun 2021, DKI Jakarta mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dengan jumlah UMKM meningkat sekitar 5,24%. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan kembali, penurunan ini dipengaruhi oleh lonjakan inflasi yang signifikan, di mana tingkat inflasi bertambah dari 1,87% pada tahun 2021 menjadi 5,51% tahun 2022. Inflasi yang tinggi ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun, yang akhirnya berdampak pada keberlangsungan UMKM. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM di DKI Jakarta menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari dampak pandemi hingga tekanan ekonomi makro seperti inflasi.

UMKM di Indonesia menghadapi beberapa situasi yang menantang dalam mengakses layanan keuangan, yang menghambat kemampuan mereka untuk tumbuh dan bersaing di pasar UMKM di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mengakses layanan keuangan, yang menghambat kemampuan mereka untuk tumbuh dan bersaing di pasar (Prabowo et al., 2021). Salah satu kendala utama adalah minimnya ketersediaan lembaga keuangan formal yang mampu melayani kebutuhan khusus UMKM (Riffianto & Suryani, 2016). Banyak bank tradisional dan lembaga keuangan cenderung memilih untuk memberikan pinjaman kepada

lembaga besar atau perusahaan yang sudah mapan, sehingga para pelaku usaha mempunyai pilihan yang terbatas guna mendapatkan modal yang mereka butuhkan guna mengembangkan usaha mereka (Sanistasya et al., 2019). Oleh karena itu, pemerintah menetapkan inklusi keuangan sebagai salah satu agenda prioritas dengan mendorong perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk perbankan dan sistem pembayaran digital. Akses ke layanan keuangan formal diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam hal pendapatan (Departem Literasi dan Keuangan OJK, 2021).

Dalam hal ini UMKM memiliki potensi besar untuk tumbuh melalui adopsi layanan keuangan digital yang lebih luas. Sebelum pandemi COVID-19, UMKM menghadapi tantangan besar dalam hal akses pembiayaan, pemasaran, dan infrastruktur teknologi. Namun, COVID-19 mendorong transformasi digital yang lebih cepat di kalangan UMKM sebagai respons terhadap perubahan perilaku konsumen dan pembatasan aktivitas fisik (Imam Fathoni, 2024). Berdasarkan data dari Kadata *Insight Center* (2021), keadaan UMKM sebelum pandemi COVID-19 relatif baik bagi hampir semua pelaku usaha. Namun, ketika musibah melanda, situasi tersebut berbalik. Sebanyak 56,8% berada dalam kondisi buruk, sementara hanya 14,1% UMKM yang masih dalam kondisi yang baik (Kadata, 2021). Akan tetapi, UMKM yang menggunakan layanan keuangan digital selama pandemi memang menunjukkan peningkatan pendapatan yang signifikan, sekitar 30% lebih tinggi dibandingkan UMKM yang tidak memanfaatkan layanan ini. Digitalisasi terbukti membantu UMKM bertahan bahkan berkembang di masa sulit tersebut. Selain meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas, digitalisasi juga mempermudah pengelolaan transaksi dan efisiensi operasional (Kadata, Kadata.co.id, 2023).

Intelligentia - Dignitas



Gambar 1. 2 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional 2013-2024

Sumber : SNLIK, (2024)

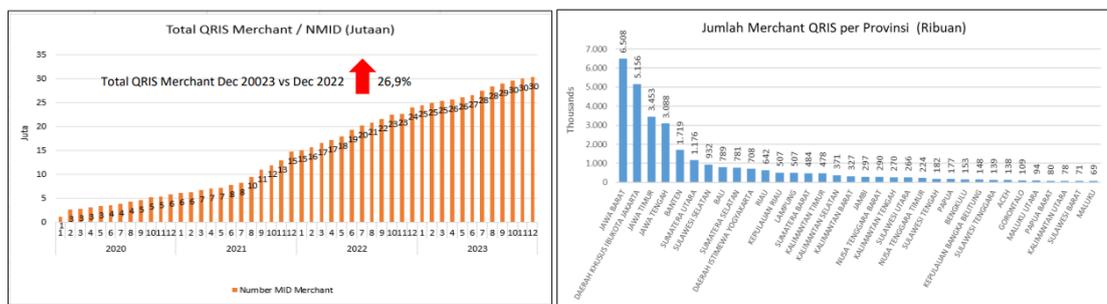
Mengacu pada hasil SNLIK tahun 2024 oleh OJK, Terdapat catatan bahwa indeks inklusi keuangan menunjukkan tren yang meningkat. Namun, pada periode 2022 hingga 2024, indeks tersebut menurun dari 85,1 menjadi 75,02. Berdasarkan provinsi, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan indeks inklusi keuangan sebesar 96,62%.

Inklusi keuangan atau kemudahan dalam akses pembayaran banyak dibahas oleh para peneliti. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Larissa Adella Octavina dan Maria Rio Rita mendapatkan hasil bahwa digitalisasi keuangan dalam pembayaran memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja ekonomi UMKM, terutama selama pandemi COVID-19 (Octavina & Rita, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mei Ruli Ninin Hilmawati menunjukkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan wirausaha, sejalan dengan kesimpulan tersebut (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021a).

Salah satu strategi yang mulai diterapkan pemerintah untuk mendorong keberlanjutan dan memperkuat sektor UMKM adalah peningkatan inklusi keuangan melalui akses yang lebih mudah ke layanan perbankan dan sistem pembayaran digital (Richard et al., 2024). Dengan menyediakan akses ke layanan keuangan formal seperti pinjaman mikro dan metode pembayaran digital, UKM dapat meningkatkan pengelolannya dan meningkatkan daya saingnya di

pasar nasional dan internasional. Keberhasilan inklusi keuangan dapat mendorong UMKM untuk meningkatkan kompetensi keuangannya dan mengambil keputusan perekonomian yang lebih baik dan tepat (Richard et al., 2024).

Pelaku UMKM masih menghadapi tantangan utama dalam mengakses pasar untuk memasarkan produknya. Namun di era digital saat ini, UMKM perlu memiliki strategi bertahan agar tetap kompetitif. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan sistem pendapatan online. Pemasaran dan periklanan virtual membuka peluang pasar yang jauh lebih luas dibandingkan dengan metode pendapatan yang sepenuhnya bergantung pada sistem *offline*. Akan tetapi, terdapat sejumlah UMKM yang belum bisa memanfaatkan teknologi digital dengan baik atau secara maksimal.



Gambar 1. 3 Data QRIS Merchant Indonesia 2020 - 2023

Sumber: ASPI, 2024

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), jumlah merchant yang menggunakan QRIS di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hingga akhir Desember 2023, jumlah merchant QRIS telah mencapai 30,4 juta, meningkat sebesar 26,9% dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan distribusi merchant QRIS per provinsi, DKI Jakarta menempati posisi kedua setelah Jawa Barat dengan jumlah sekitar 5.200 merchant.

Transformasi digital dinilai sebagai salah satu kunci penting bagi keberlangsungan bisnis UMKM, terlebih lagi dengan meningkatnya kebergantungan masyarakat luas pada layanan digital pasca-pandemi COVID-19. Setelah melewati masa krisis akibat pandemi, UMKM perlahan mulai bangkit dan berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika pasar yang terus berkembang.

Adaptasi terhadap perubahan ini mendorong pelaku UMKM untuk lebih memahami tata kelola bisnis secara digital, termasuk dalam strategi dalam upaya meningkatkan daya saing, para pelaku UMKM mulai mengoptimalkan berbagai platform digital sebagai sarana pemasaran dan transaksi.

Akibatnya, periode ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan UMKM. Fintech adalah jenis teknologi yang beroperasi di sektor jasa keuangan atau pembiayaan dan sangat penting untuk mendukung komunitas, khususnya pelaku usaha, untuk meningkatkan kapasitas mereka dengan menyediakan layanan pembiayaan. Berdasarkan Siaran Pers No. 475/HM/KOMINFO/08/2024, pemerintah menetapkan target untuk tahun 2024 agar sebanyak 30 juta pemilik usaha memanfaatkan teknologi berbasis digital. Siaran tersebut merupakan langkah strategis guna meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung sektor UMKM, yang secara historis menjadi fondasi perekonomian negara.

Pemerintah memegang peranan strategis dalam mendorong transformasi digital sektor UMKM sebagai bagian dari komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan tujuan konstitusional Negara Republik Indonesia. Diharapkan bahwa UMKM akan mendapatkan manfaat dari penerapan teknologi digital dalam hal perluasan jangkauan pasar, peningkatan efisiensi operasional, dan penguatan daya saing di tengah dinamika ekonomi digital yang terus berubah. Keberhasilan program digitalisasi ini akan memberikan dampak kemajuan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, Mengingat sektor UMKM merupakan pemberi kerja terbesar dalam hal lapangan kerja dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB.

Menurut penelitian yang dilakukan Winarto (2020), beliau meneliti bagaimana teknologi keuangan mempengaruhi kinerja usaha di Kabupaten Batang, Pekalongan, dan Pemalang, hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi keuangan berdampak signifikan terhadap kinerja UMKM. Hasil penelitian yang sama juga diteliti Liliana dkk (2021). Namun, menurut penelitian Maulana (2022), menunjukkan terdapat perbedaan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa fintech

tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM di sektor makanan dan minuman di Magelang.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang yang tersedia, penelitian ini bermaksud untuk mencari secara menyeluruh pengaruh teknologi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Indonesia, yang berfokus pada bagaimana mereka meningkatkan pendapatannya di wilayah DKI Jakarta. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut agar dapat mempelajari serta memahami terkait **“Pengaruh Inklusi Keuangan dan Teknologi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM (Studi kasus pada UMKM di DKI Jakarta)”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

- 1) Apakah terdapat pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM?
- 2) Apakah inklusi keuangan memengaruhi teknologi keuangan?
- 3) Apakah teknologi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM?
- 4) Apakah inklusi keuangan memengaruhi kinerja UMKM melalui teknologi keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis dampak inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM.
- 2) Menganalisis dampak inklusi keuangan terhadap teknologi keuangan.
- 3) Menganalisis dampak teknologi keuangan terhadap kinerja UMKM.
- 4) Menganalisis dampak inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM melalui teknologi keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Peneliti
Observasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi para akademisi memanfaatkan pengetahuannya tentang teknologi keuangan dan inklusi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kinerja UMKM.
- 2) Bagi Akademis

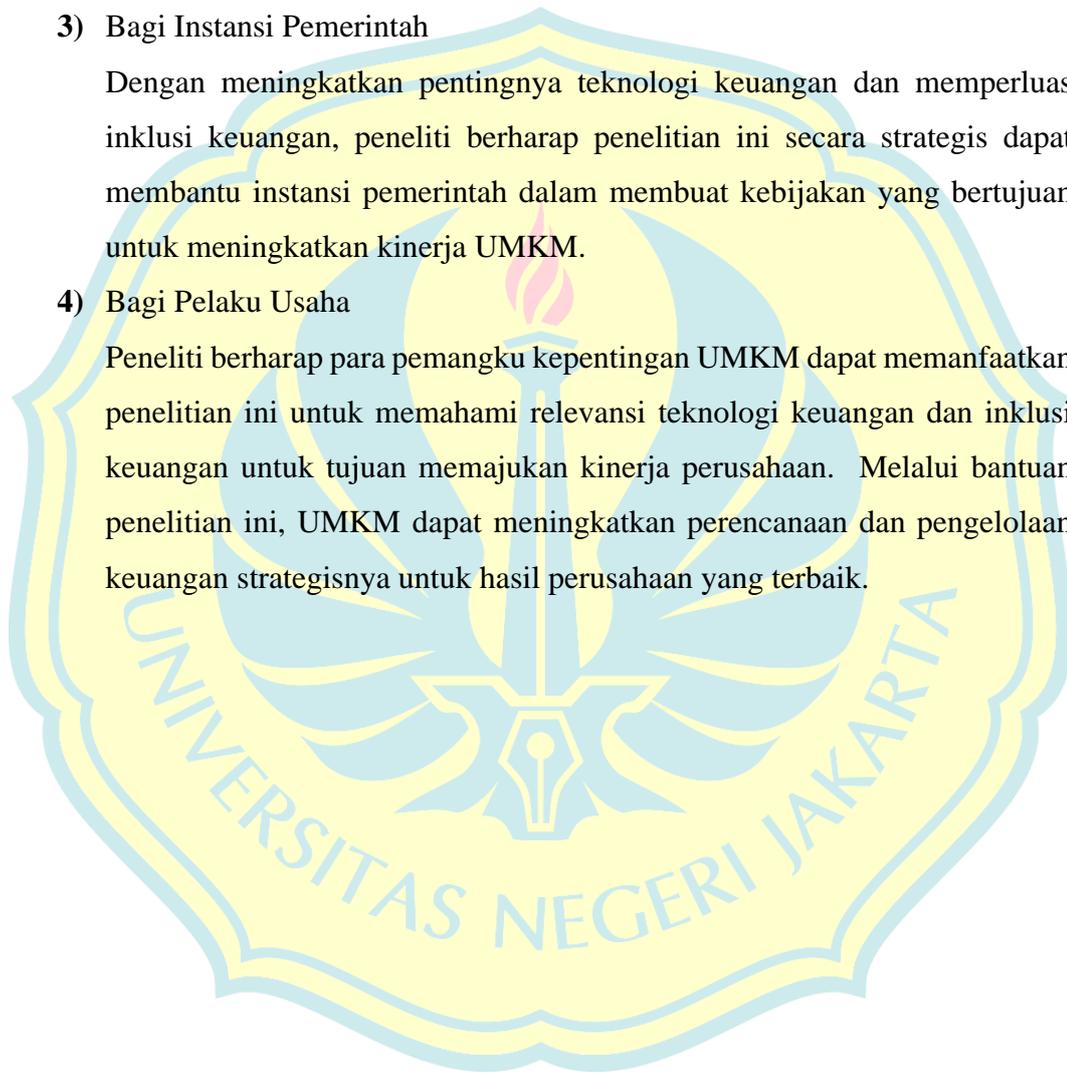
Temuan penelitian ini dimaksudkan sebagai landasan ilmiah atau tolak ukur untuk kajian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan aspek inklusi keuangan dan teknologi finansial dalam konteks peningkatan kinerja UMKM.

3) Bagi Instansi Pemerintah

Dengan meningkatkan pentingnya teknologi keuangan dan memperluas inklusi keuangan, peneliti berharap penelitian ini secara strategis dapat membantu instansi pemerintah dalam membuat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja UMKM.

4) Bagi Pelaku Usaha

Peneliti berharap para pemangku kepentingan UMKM dapat memanfaatkan penelitian ini untuk memahami relevansi teknologi keuangan dan inklusi keuangan untuk tujuan memajukan kinerja perusahaan. Melalui bantuan penelitian ini, UMKM dapat meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan strategisnya untuk hasil perusahaan yang terbaik.



Intelligentia - Dignitas